

**SOSIALISASI PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN POLITIK BAGI CALON
PEMILIH PEMULA DI KABUPATEN SINJAI****Suhardiman Syamsu¹, Andi Lukman Irwan², A.M.Rusli³, Ashar Prawitno⁴**^{1,2,3,4}Departemen Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Hasanuddin,
Email: asharprawitno@unhas.ac.id**Abstract**

Elections are also the will of the people or the desire of the people so that there is a change in the process of selecting leaders through elections with a better and open system both in the presidential and regional head elections. In every election, there will be novice voters who are taking part in the election for the first time or have their right to vote to participate in the implementation of elections, be it presidential elections or regional head elections. The target for this long-term service is the realization of democratic and political education so that political awareness is awakened and they have adequate knowledge so that they can think rationally in making decisions and using political rights consciously and rationally. This Service Program will have been carried out on October 1, 2021 in the form of indoor activities with the Socialization method. the socialization method provided is using a system of lecture methods, simulations, case studies, brainstorming, games, discussions and watching short films. The materials provided are as follows: (a) Democracy and challenges in the Millennial Era, (b) Development of Government Politics in Indonesia, (c) Elections, (d) Politics as a form of love for the homeland and (e) Follow-up plans.

Abstrak

Pemilu juga merupakan kehendak rakyat atau keinginan rakyat agar ada perubahan dalam proses pemilihan pemimpin melalui pemilu dengan sistem yang lebih baik dan terbuka baik dalam pemilihan presiden maupun kepala daerah. Tiap pelaksanaan pemilu pasti akan terdapat pemilih pemula yang baru pertama kali mengikuti atau memiliki hak mereka hak pilih untuk ikut serta dalam pelaksanaan pemilu baik itu pemilu presiden ataupun pemilihan kepala daerah. Target untuk jangka panjang pengabdian ini ialah terwujudnya pendidikan demokrasi dan politik. Agar terbangun kesadaran berpolitik dan dimilikinya pengetahuan yang memadai sehingga mereka dapat berpikir secara rasional dalam pengambilan keputusan dan penggunaan hak politik secara sadar dan rasional. Program Pengabdian ini akan Telah dilaksanakan pada tanggal 1 oktober 2021 dalam bentuk kegiatan indoor dengan metode Sosialisasi. metode sosialisasi yang diberikan yakni menggunakan sistem metode ceramah, simulasi, case study, brainstorming, games, diskusi dan menonton film pendek. Adapun materi materi yang diberikan sebagai berikut : (a)Demokrasi dan tantangan di Era Milenial, (b)Perkembangan Politik Pemerintahan Di Indonesia, (c)Kepemiluan, (d)Politik sebagai wujud cinta tanah air dan (e)Rencana tindak lanjut

1. PENDAHULUAN**Analisis situasi**

Pesta Demokrasi sering disebut sebagai Pemilihan umum yang dilakukan sebuah negara. Dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi, pemilu menjadi kunci terciptanya demokrasi. Di Indonesia pemilu merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintah. pemilu berlandaskan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Partisipasi politik dalam negara demokrasi

merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). Makin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) dalam pemilu. Oleh karena itu, tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum merupakan hal yang sangat penting pula untuk ditilik, karena rendah atau tingginya suatu partisipasi merupakan sinyal dan indikator penting terhadap jalannya proses demokrasi dan pengejawantahan dari kedaulatan rakyat. Pemilihan umum dapat dikatakan sebagai salah satu sarana demokrasi dan bentuk perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemimpin yang aspiratif, berkualitas, serta bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat. Suatu kategori kelompok pemilih yang sangat menarik untuk diamati dan diteliti lebih jauh adalah pemilih pemula. Pemilih Pemula adalah pemilih-pemilih yang baru pertama kali akan memberikan suaranya dalam Pemilu. Seperti dijelaskan dalam Pemilu Untuk Pemilih Pemula Modul I Komisi Pemilihan Umum (2013) kategori Pemilih Pemula adalah warga negara yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya di dalam kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu). Mereka bisa berasal dari Warga Negara Indonesia (WNI) yang genap berusia 17 tahun atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah pernah menikah. Pemilih muda pada Pemilu adalah generasi baru pemilih yang memiliki sifat dan karakter, latar belakang, pengalaman dan tantangan yang berbeda dengan para pemilih di generasi sebelumnya. Sebagian besar di antara mereka berasal dari kalangan pelajar, berstatus ekonomi baik, dan pada umumnya tinggal di kawasan perkotaan atau sekitarnya. Kelompok ini sangat tersentuh kemajuan teknologi informasi, mereka menggunakan alat-alat teknologi canggih dengan baik, mulai dari handphone, laptop, tablet dan aneka gadget lainnya. Mereka juga sangat fasih dalam penggunaan fasilitas dan jaringan sosial media, seperti, twitter, facebook, linked in, dan sebagainya. Mereka sangat terbuka untuk mempelajari hal-hal yang baru, kritis dan juga mandiri. Kelompok pemilih muda menghadapi tantangan yang sangat berat, mulai dari perubahan politik dan permasalahan dalam negeri yang tidak kunjung jelas arah penyelesaiannya hingga tekanan-tekanan globalisasi, perdagangan bebas, terorisme, intervensi internasional, dan sebagainya. Perbedaan sifat dan karakter, latar belakang, pengalaman dan tantangan para pemilih muda Pemilu perlu dipahami dengan baik, terutama untuk mempersiapkan pemilih muda yang cerdas, kritis dan berorientasi masa depan. Ditambah dengan fakta bahwa para pemilih muda ini adalah pengemban tampuk pimpinan

selanjutnya pada saat 100 Tahun Republik Indonesia di tahun 2045 nanti. Republik Indonesia masih akan tetap ada (exist) di waktu tersebut akan sangat ditentukan oleh para pemilih muda di Pemilu. Pengaruh pemilih muda yang penting dan signifikan pada Pemilu sudah disadari oleh Partai Politik peserta Pemilu dan para calon kandidatnya. Bahkan perburuan suara pemilih muda sudah dimulai sejak Pemilu yang sudah diselenggarakan selama dua tahun terakhir yaitu banyak yang sudah mulai memperhitungkan suara dari pemilih muda dalam proses kampanye sehingga tidak jarang berbagai cara dilakukan untuk bisa menghimpun suara para pemilih muda ini. Salah satu yang harus menjadi perhatian khusus adalah pendidikan politik yang masih rendah di kalangan pemilih muda atau bisa disebut juga sebagai pemilih Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 10 (1) (2018): 57-62 59 pemula tersebut.

Pendidikan politik yang masih rendah membuat kelompok ini rentan dijadikan sasaran untuk dimobilisasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Apabila merujuk pada pengalaman masa lalu, contohnya para pemilih muda ini sering diarahkan kepada salah satu pasangan calon dengan membawa muatan-muatan atau jargon-jargon tertentu, baik dengan melalui perang iklan dan sosial media tanpa adanya pemahaman yang mendalam kenapa mereka harus memilih pasangan calon tersebut. Ada beberapa gejala dalam penulisan ini yaitu. masih kurang pemahannya pemilih pemula akan proses pelaksanaan pemilu sehingga tidak memberikan hak suaranya pada pemilihan umum, pemilih pemula mudah di pengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu, terutama oleh orang terdekat, seperti anggota keluarga mulai dari orang tua hingga kerabat dan masih kurangnya minat pemilih pemula untuk mengikuti penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara untuk merangsang partisipasi pemilih pemula.

Istilah partisipasi yang diambil dari bahasa Inggris, “participation” yang secara umum dapat diartikan sebagai keikutsertaan warga negara secara aktif dalam aktivitas-aktivitas tertentu (Sitepu, 2012). Dalam Kamus Politik, partisipasi adalah ambil bagian; ikut; turut. Istilah ini lebih populer dalam mengartikan ikutnya seseorang atau badan dalam satu pekerjaan atau rencana besar (Marbun, 2013). Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang, kelompok, atau organisasi untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik. Misalnya, ikut pemilu, memengaruhi pengambilan keputusan, dan ikut partai politik (Kaelola, 2009: 222). Menurut Davis dalam Sastroadmojo (1995:85) partisipasi politik adalah sebagai mental dan emosional yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada tujuan atau cita-cita kelompok atau turut bertanggung jawab padanya. Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 2008 dalam Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemilih pemula adalah warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah Warga

Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang- Undang Pemilu.

Permasalahan Mitra

Pelaksanaan pemilu dilaksanakan sebagai bukti bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan sesuai, Pasal 1 dan 2 Undang–Undang Dasar 1945. Pelaksanaan pemilu merupakan suatu bentuk partisipasi politik yang terjadi di masyarakat karena partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara dalam kegiatan yang legal dalam kehidupan politik untuk ikut serta mempengaruhi keputusan pemerintahan dan ikut serta memilih wakil-wakil rakyat dikursi pemerintahan.

Pemilu juga merupakan kehendak rakyat atau keinginan rakyat agar ada perubahan dalam proses pemilihan pemimpin melalui pemilu dengan sistem yang lebih baik dan terbuka baik dalam pemilihan presiden maupun kepala daerah. Tiap pelaksanaan pemilu pasti akan terdapat pemilih pemula yang baru pertama kali mengikuti atau memiliki hak mereka hak pilih untuk ikut serta dalam pelaksanaan pemilu baik itu pemilu presiden ataupun pemilihan kepala daerah.

Namun dalam kenyataan banyak pemilih pemula yang belum mengerti akan pentingnya keikutsertaan mereka dalam pemilu dan apa sajakah hak warga negara dalam pemerintahan terlebih dalam hak politik warga negara yang mereka miliki. Para pemilih pemula ini juga kurang merespon akan berita-berita tentang politik khususnya tentang pemilihan umum yang akan mereka ikuti sebagai salah satu hak politik warga negara yang mereka miliki.

Memperkenalkan hak politik warga negara terhadap para pemilih pemula atau pelajar ini perlu ada media sebagai penunjang untuk memperkenalkan hak politik itu sendiri kepada para pemilih pemula. Pemerintah mengantisipasi ketidaktahuan para pemilih pemula terhadap hak politik mereka dengan memberikan pendidikan pengetahuan hak dan kewajiban warga negara dalam kurikulum sekolah dalam hal ini pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang ada disekolah dan disesuaikan dengan tingkat pendidikannya. Namun masalah yang ada terkadang sekolah atau guru hanya memberikan pengertian-pengertian dari apa yang ada dipelajaran saja tanpa memberikan pendekatan akan pentingnya ikut serta para pemilih pemula dalam pemilu yang akan dilaksanakan.

Peran orang tua juga dianggap mempunyai andil dalam pengetahuan yang dimiliki pemilih pemula tentang hak politik mereka ketika pelaksanaan pemilu. Seharusnya para orang tua memberi masukan kepada anak-anaknya tentang apa itu pemilu dan memberikan saran pada anak-anaknya yang sudah menjadi pemilih pemula dalam menentukan calon yang akan mereka pilih bukan memaksa untuk memilih yang sama atau mengikuti pilihan orang tua, tetapi orang

tua memberikan masukan agar sang anak dapat memilih sesuai dengan hati nurani mereka atau mana yang menurut mereka paling baik untuk menjadi sosok pemimpin

Pemilih pemula minim akan pengetahuan tentang para kandidat atau calon kepala daerah yang mengikuti pemilu di daerahnya. Mereka akan cenderung mengikuti pilihan orang tua atau teman sejawad maka para pemilih pemula ini menjadi sasaran yang bagus untuk mendapatkan suara bagi para kandidat dengan pendekatan yang menarik perhatian para pemilih pemula.

Dipilihnya kabupaten Sinjai sebagai tempat pelaksanaan kegiatan karena kabupaten Sinjai dianggap sebagai role model pemilu di Sulawesi selatan. Untuk melihat hal tersebut dapat ditinjau dari Pemilihan Presiden dan Anggota DPD, DPR, DPRD pada tahun 2019 yang lalu. Sesuai dengan hasil perolehan suara yang di dapat sebesar 51.156 suara yang memberikan hak pilihnya dari 67.132 jiwa yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap atau ada 76% yang memilih dan 24% yang tidak memilih (panrita.com). Meningkatnya angka pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya ini, peran dari pemilih pemula sangat mendominasi. Mengingat pemilih pemula yang baru memasuki usia hak pilih sebagian besar belum memiliki jangkauan politik yang luas untuk menentukan kemana mereka harus memilih. Selain itu, ketidak tahuan dalam politik praktis membuat pemilih pemula sering tidak berpikir rasional dan lebih mementingkan kepentingan jangka pendek. Sehingga terkadang apa yang mereka pilih tidak sesuai yang diharapkan. Telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, Para pemilih pemula ini umumnya belum terinformasikan serta tidak memiliki pendidikan demokrasi dan politik memadai. Dengan permasalahan ini, Tim Pengusul pengabdian yang bermitra dengan BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten Sinjai akan berupaya memberikan pendidikan demokrasi politik pemilih pemula melalui Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Demokrasi Dan Politik Bagi Calon Pemilih Pemula Di Kabupaten Sinjai

METODE PELAKSANAAN

Berdasarkan hasil analisis masalah dan target luaran, maka program ini akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan indoor dengan metode Sosialisasi. Diharapkan dengan metode sosialisasi yang menarik mampu memberikan stimulus kepada calon pemilih pemula/pemuda untuk terlibat aktif dan merespon penyampaian dan materi yang diberikan. Kegiatan akan dilaksanakan selama 2 hari dengan metode pelatihan menggunakan sistem metode ceramah, simulasi, case study, brainstorming, games, diskusi dan menonton film pendek

Adapun materi pada tahap penyadaran (pemberian materi)

- a. *Materi Pertama:* Demokrasi dan tantangan di Era Milenial

- b. *Materi Kedua: Perkembangan Politik Pemerintahan Di Indonesia*
- c. *Materi Ketiga : Kepemiluan*
- d. *Materi Keempat: Politik sebagai wujud cinta tanah air*
- e. *Materi Kelima: Rencana tindak lanjut*

Adapun materi tambahan akan diberikan oleh pihak mitra yakni Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sinjai sebagai pengantar mendukung materi utama yang diberikan.

PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2021 bertempat di Aula SMAN 1 Sinjai dan dihadiri 41 peserta orang yang terdiri dari ketua-ketua OSIS SMA/MA, dengan menerapkan protokoler yang ketat. Dipilihnya para organisasi-organsisasi OSIS Sekabupaten Sinjai untuk menjadi peserta, Karena mereka dianggap representatif pemilih pemula aktif dari kalangan pemuda dan pelajar yang mampu memberikan penanaman pengetahuan sikap berkaitan dengan emilihan umum kepada teman-temanya ketika kembali ke sekolah masing-masing.



Gambar 1. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan pengabdian

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021

Tahap Pelaksanaan

Sebelum sosialisasi dimulai, telah dilaksanakan pratest mengenai pemahaman pengetahuan demokrasi kepada peserta. Pretest ini berupa penjelasan berkaitan dengan hak dan kewajiban warga Negara dan system pemilihan umum. Dari hasil pretest, ternyata 80% belum mengatahui secara terukut tentang hal tersebut.

Adapun Deskripsi singkat dari masing-masing materi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut::

Materi Pertama: Demokrasi dan tantangan di Era Milenial

Kaum milenial memiliki peran yang sangat strategis dalam menyukseskan pembangunan demokrasi di era modern saat ini. Perkembangan teknologi dan era disrupsi saat ini memungkinkan generasi penerus bangsa ini mengambil dan memerankan fungsinya sebagai pilar kebangsaan, terutama dengan cara aktif dan kreatif dalam memanfaatkan berbagai fasilitas teknologi dalam dunia politik. Kaum milenial bisa menjadi trigger bagi terbangunnya demokrasi yang berkualitas, manakala mereka mau dan terkelola dalam alam dan dimensinya oleh sistem serta instrumen-instrumen negara sebagai media demokrasi. Hal ini terbukti dari peran pemilih milenial pada Pemilu yang baru berlalu yang jumlahnya mendekati angka 40 persen dari total warga negara yang menggunakan hak pilihnya. Artinya terdapat hampir 70 juta pemilih milenial yang telah menggunakan hak kenegaraannya dalam pesta demokrasi besar itu. Disampaikan lebih lanjut, dengan engedepankan mediasi dan mengelola bakat politik serta masuknya teknologi dalam komunikasi politik, maka peningkatan literasi demokrasi kaum milenial harus terus dilakukan sehingga mampu memainkan perannya sebagai pemilih yang cakap media, tanggap, kreatif dan advokatif.

Menterjadikan demokrasi itu menjadi urusan kekitaan, kata akademisi yang juga Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan SDM Undiksha ini, salah satunya harus ditunjang dari terselenggaranya Pemilu yang berkualitas yang minimal memenuhi lima syarat, yaitu membuka peluang yang bersifat kompetitif bagi setiap peserta secara luas, diselenggarakan secara berkala dengan rule of game yang menjamin kepastian, inklusif dengan menempatkan setiap warga negara sama dalam segala dimensinya, dilakukan oleh penyelenggara yang independen dan akuntabel, dan pelaksanaannya bersifat luber-jurdil.

Sistem kepartaian yang dianut dan terapkan di Indonesia selama ini juga dinilai masih belum menjamin terselenggaranya demokrasi yang benar dan sebenarnya. Pemilu sebagai fasilitas sirkulasi elit, baik antara elit yang satu dengan yang lainnya, maupun pergantian dari kelas elit yang lebih rendah ke kelas elit yang lebih tinggi belum terpola secara baik, karena partai politik lebih mengedepankan pembangunan partai massa yang memiliki ciri-ciri meningkatnya aktivitas hanya menjelang pemilu, menganut sistem keanggotaan yang amat longgar, belum memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta belum mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. “Untuk itu maka diperlukan sebuah terobosan dalam mekanika pembangunan system partai pada tataran supra struktur, sehingga akan menguatkan parta politik tersebut pada tataran akar rumput, tingkat pusat, dan di pemerintahan,” mantan aktivis mahasiswa UNUD tahun 1991 ini.

Materi Kedua : Perkembangan Politik Pemerintahan Di Indonesia

Indonesia saat ini ditandai oleh kedaulatan rakyat termanifestasi dalam pemilihan parlemen dan presiden setiap lima tahun. Sejak berakhirnya Orde Baru yang dipimpin presiden Suharto dan mulainya periode Reformasi, setiap pemilu di Indonesia dianggap bebas dan adil. Namun, Indonesia belum bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme maupun 'politik uang' di mana orang bisa membeli kekuasaan atau posisi politik. Misalnya, segmen miskin dari masyarakat Indonesia 'didorong' untuk memilih calon presiden tertentu pada hari pemilihan dengan menerima uang kecil di dekat kotak suara. Strategi seperti ini masih tetap dilakukan, bahkan digunakan oleh semua pihak politik yang terlibat (dan ini sebenarnya berarti race-nya lumayan adil maka berbeda dengan pemilu era Orde Baru). Kami menganggap soal tersebut bagian dari proses Indonesia untuk berkembang menjadi demokrasi 'penuh' (saat ini - berdasarkan Indeks Demokrasi yang dirilis Economist Intelligence Unit - Indonesia masih dianggap sebagai demokrasi 'cacat'). Perlu ditekankan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang muda dan karena itu wajar kalau kadang-kadang mengalami 'sakit tumbuh'. Kondisi politik Indonesia itu pasti penting sekali untuk mereka yang berencana berinvestasi di Indonesia atau mereka yang mau menjadi terlibat dalam hubungan bisnis dengan Indonesia. Di bagian ini kami menyajikan gambaran komposisi politik Indonesia saat ini serta ikhtisar bab-bab penting dalam sejarah politik negara ini.

Materi Ketiga : Kepemiluan

Pengertian Pemilihan Umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilu sebagai berikut: "Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankn kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersamasama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara". Walaupun setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memilih, namun Undang-Undang Pemilu mengadakan pembatasan umur untuk dapat ikut serta di dalam pemilihan umum. Batas waktu untuk menetapkan batas umum ialah waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum, yaitu : Sudah genap berumur 17 tahun dan sudah kawin. Adapun ketetapan batas umur 17 tahun yaitu berdasarkan perkembangan kehidupan politik di Indonesia, bahwa warga negara 22 Republik Indonesia yang telah

mencapai umur 17 tahun, ternyata sudah mempunyai pertanggung jawaban politik terhadap negara dan masyarakat, sehingga sewajarnya diberikan hak untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat.

Materi Keempat : Politik sebagai wujud cinta tanah air

(dibawakan oleh: Ashar Prawitno, S.IP, M.Si)

Cinta tanah air merupakan sikap politik yang sudah mendarah daging bagi para pejuang kemerdekaan dan para pendiri bangsa. Pada saat negerinya dijajah, hatinya langsung tergerak, jiwanya berontak. Padahal, jika mereka mau, bekerjasama dengan penjajah akan lebih menguntungkan secara materi, jabatan tinggi sebagai abtenaar atau amtenar pun bisa diraih. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup terjajah. Semboyan ini menunjukkan betapa besar kecintaan para pejuang kepada tanah airnya. Hidup bukan soal kenikmatan duniawi, bukan soal harta dan jabatan, tapi soal harga diri, soal kebebasan dan hak-hak hidup yang harus dihargai. Buat apa bergelimang harta, buat apa bertakhta, jika rakyat yang dipimpinnya sengsara karena diperas bagaikan sapi perah. Bagi yang hidupnya hanya untuk kenikmatan duniawi, mungkin akan berpikir betapa naifnya Pangeran Diponegoro yang berjuang mati-matian untuk mempertahankan sebidang tanah miliknya yang ingin dikuasai penjajah. Bagi Pangeran Diponegoro, bukan soal kepemilikan tanah yang ia perjuangkan, tapi soal harkat dan martabat, dan soal hak-hak yang tidak bisa dirampas secara semena-mena.

Bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku, ras, dan agama sangat rawan dipecah belah oleh penjajah dengan siasat *divide et impera* (politik pecah belah). Kecintaan kepada tanah air membuat para pejuang bersatu, bahu membahu mengusir penjajah. Mereka menyadari sepenuhnya bahwa perbedaan suku, ras, dan agama sangat mudah dijadikan alat penjajah untuk memecah belah. Lantas perbedaan itu mereka jadikan sebagai kekayaan demografi untuk bersama-sama membebaskan bangsanya dari penjajahan.

KESIMPULAN

Hasil yang akan dicapai sampai selesainya kegiatan ini mencapai 90 %. Hal ini disebabkan kegiatan inti dari pengabdian ini telah berjalan dengan baik. Indikator nya adalah, peserta yang mengikuti kegiatan ini sangat antusias. Antusiasisme peserta terlihat dengan mereka Berharap agar mereka tetap membutuhkan pelatihan berkelanjutan karena sangat diperlukan. Mereka juga diharapkan untuk terus mengharap agar kegiatan pengabdian ini dapat dilanjutkan kembali pada tahun depan sesuai dengan program kerja pihak mitra pada pengabdian ini

REFERENSI

- Achmad Zubaidi dan Kaelan, Pendidikan Kewarganegaraan, Paradigma, Yogyakarta, 2007.
- Affan Ghafar, Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000.
- Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Azyumardi Azra. Pendidikan Kewarganegaraan (civic education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, Prenada Kencana, Jakarta, 2000. Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Quran dan Terjemahnya, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, Jakarta, 1995.
- Eep Syaifulloh Fatah, Catatan Atas Gagalnya Politik Orde Baru, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998.
- Georg Serensen, Demokrasi dan Demokratisasi, PustakaPelajar. Yogyakarta, 2003.
- Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta, 2007.
- Luky Sandra Amalia (editor), Evaluasi Pemilu Legislatif 2014: Analisis Proses dan Hasil, Pustaka Pelajar, Cetakan 1, Yogyakarta, 2016.
- M. Rusli Karim, Pemilihan Umum Demokratis Kompetitif, Tiara Wacana, Yogyakarta , 1999.